



Koordinasi Antarlembaga Kunci Penyelesaian Masalah Sampah di DIY

TAJUK

Proyek pembangunan pusat pengolahan sampah *Intermediate Treatment Facility* (ITF) Pusat Karbonasi Bawuran, Bantul, mandek. Padahal, ITF yang dibangun di atas Sultan Grond tersebut diproyeksikan mampu menerima 70 ton sampah per hari, dan dapat mengolah sampah hingga 50 ton setiap harinya. Rencananya, tempat itu akan mengolah sampah-sampah yang berasal dari Kota Jogja dan Bantul.

Pengerjaan fisik ITF yang berada di Pedukuhan Sentulrejo, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Bantul, itu mandek. Alhasil, rencana pengoperasian ITF yang ditargetkan mulai Juni

2024, tinggal isapan jempol. Hingga saat ini tak ada aktivitas pembangunan di lokasi proyek yang ditangani Perumda Aneka Dharma tersebut. Sejumlah alat dan mesin pengolah sampah hibah dari Pemda DIY dibiarkan terbengkalai di lokasi pembangunan. Bangunan ITF Bawuran sejauh ini masih berwujud fondasi dan rangka dan belum ada penutup.

Direktur Perumda Aneka Dharma, Yuli Budi Sasangka, menyatakan tersendatnya pembangunan ITF lantaran belum adanya penyertaan modal dari APBD Kabupaten Bantul. Padahal, pembangunan ITF Bawuran membutuhkan anggaran Rp17 miliar. Sementara penyertaan

modal yang seharusnya diberikan oleh Pemkab Bantul pada Aneka Dharma pada 2024 mengacu kepada Pasal 7 Perda No.8/2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, senilai Rp2 miliar.

Sementara pada Pasal 7 juga disebutkan jika penyertaan modal daerah pada Aneka Dharma telah ditetapkan sebesar Rp20 miliar. Sesuai perda, Pemkab menyuntikkan modal daerah untuk Aneka Dharma pada 2022 hingga 2026 dengan rincian, tahun 2022 Rp3 miliar, tahun anggaran 2023 Rp2 miliar, tahun anggaran 2024 Rp2 miliar, tahun anggaran 2025 Rp2 miliar, dan tahun anggaran 2026 senilai

Rp1,98 miliar. Untuk tahun ini, Aneka Dharma belum menerima penyertaan modal. Meski ada kendala anggaran, Perumda Aneka Dharma tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan ITF pada September 2024.

Tersendatnya pembangunan ITF Bawuran ini sangat disayangkan. Terlebih, ITF ini digadagadag menjadi salah satu penyelamat krisis sampah yang terjadi di beberapa wilayah di DIY, khususnya di Kota Jogja.

Persoalan ini seharusnya tak terjadi jika koordinasi antarpemerintah, khususnya Pemkab Bantul dengan Pemda DIY, serta Pemkab Bantul dan Pemkot Jogja berjalan dengan

baik. Sebab, sejak awal Pemda DIY berkomitmen membantu upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah sampah.

Tersendatnya anggaran pembangunan ITF Bawuran menjadi bukti nyata jika selama ini koordinasi tak dilakukan dengan baik. Berbagai rencana kebijakan yang ada masih sekedar 'pemanis mulut, belum sampai eksekusi. Solusi masalah ini sebenarnya sederhana. Jika Pemkab Bantul kesulitan mengalokasikan anggaran penyertaan modal, Pemda DIY bisa turun tangan membantu dengan anggaran yang dimiliki. Jika tersendatnya

pembangunan ITF Bawuran karena ketidakmampuan Perumda Aneka Dharma sebagai pelaksana proyek, maka segera alihkan ke perusahaan lain yang memiliki kompetensi. Koordinasi harus dilakukan dengan cepat. Jangan bertele-tele, karena masyarakat sudah menunggu ITF ini segera beroperasi agar persoalan sampah bisa terurai. Masyarakat khususnya di Bantul, Sleman dan Kota Jogja sudah jengah dengan masalah sampah yang tak kunjung selesai. Jangan sampai masalah koordinasi antarlembaga dan lambannya kerja birokrasi semakin menghambat penyelesaian soal sampah ini.

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005